

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mentransformasi layanan perbankan menjadi serba digital, namun kemudahan ini juga diikuti oleh risiko kerugian akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian sistem keamanan bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kehati-hatian bank dalam melindungi dana nasabah pada transaksi digital, khususnya terkait kasus hilangnya dana nasabah yang ditarik oleh pihak ketiga, serta mengkaji kualifikasi hilangnya dana tersebut sebagai perbuatan melanggar hukum berdasarkan Putusan Nomor 87/PDT/2023/PT Kpg

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi KUHPdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen dan layanan perbankan digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hilangnya dana nasabah akibat transaksi oleh pihak ketiga tanpa otentikasi yang disadari oleh nasabah dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ketidakhati-hatian bank karena gagal dalam mendeteksi transaksi mencurigakan dan menjaga keamanan data nasabah. Secara hukum, tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, mengingat bank memiliki kewajiban hukum (*legal duty*) untuk menjamin keamanan dana masyarakat sesuai prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*).

Kata Kunci : Asas Kehati-hatian, Perlindungan Nasabah, Transaksi Digital, Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRACT

Advances in information technology have transformed banking services into a fully digitalized world, but this convenience also carries the risk of losses due to unlawful acts or negligence in bank security systems. This study aims to analyze the application of the principle of bank prudence in protecting customer funds in digital transactions, specifically regarding cases of lost customer funds withdrawn by third parties. It also examines the qualifications of such loss of funds as an unlawful act based on Decision Number 87/Pdt/2023/PT Kpg.

The research method used is normative legal research with a statute approach and a case approach. The primary legal materials used include the Civil Code, Law Number 10 of 1998 concerning Banking, and Financial Services Authority Regulations regarding consumer protection and digital banking services.

The research results show that the loss of customer funds due to transactions by third parties without authentication that the customer is aware of can be qualified as a form of bank negligence because it failed to detect suspicious transactions and maintain the security of customer data. Legally, this action fulfills the elements of an unlawful act as regulated in Article 1365 of the Civil Code, considering that banks have a legal obligation to guarantee the security of public funds in accordance with the principle of prudence and a relationship of trust (fiduciary relationship).

Keywords: Principle of Prudence, Customer Protection, Digital Transactions, Unlawful Acts.